

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DINAS PERDAGANGAN KOTA SURABAYA DALAM PENINGKATAN EKONOMI

Saifuddin Afif¹, Sri Umiyati^{2*}

^{1,2}Universitas Hang Tuah, Indonesia

*Corresponding author: sri.umiyati@hangtuah.ac.id

Abstract

Analysis of the Surabaya City Trade Office's Micro Business Empowerment Program in Improving the Economy of Micro Business Actors Case Study on Selendang Semanggi Micro Business, Sambikerep District, Surabaya City in 2019. Etymologically empowerment comes from the basic word "daya" which means strength or ability. Starting from this understanding, empowerment can be interpreted as a process towards being empowered, or a process to gain power, strength, ability, or the process of giving power, strength, ability from those who have power to those who are less or not yet empowered. This study aims to find out how the Micro Business empowerment program run by the Surabaya City Trade Office can improve the economy of Micro Business actors. The theory used is community empowerment which is linked to the Surabaya City RPJMD which has the following programs: Product Standardization Program, Strengthening Business Competitiveness, and Marketing Expansion Program. There are three programs in the Surabaya City RPJMD 2016-2021 which are tools to be able to improve the economy of Micro Business actors.

Keywords: Empowerment, Micro Enterprises, RPJMD

Pendahuluan

Landasan sistem ekonomi di negara diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang mengatur tentang tanggung jawab yang diberikan kepada negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pencapaian kesejahteraan masyarakat agar dapat tercapai pemerintahan memaksimalkan keberadaan Usaha Mikro yang selalu mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya. Usaha Mikro merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Usaha Mikro merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian memiliki potensi besar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan, karena kegiatan perekonomian di Indonesia secara nasional menunjukkan bahwa kegiatan Usaha Mikro merupakan usaha yang konsisten dan mampu berkembang. Ketika menjadi krisis ekonomi tahun 1997 yang melanda Indonesia, Usaha Mikro menjadi ujung tombak dan penyelamat perekonomian negara karena potensi Usaha Mikro memberikan sumbangan terbesar dan signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) dalam hal ini penyerapan tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 bahwa jumlah Usaha Mikro mencapai 52,2 juta atau sekitar 98,87% dan keberadaan Usaha Mikro telah memberikan kontribusi secara nyata dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai lebih dari 96,2 juta orang.

Melihat dari Usaha Mikro di Indonesia kontribusi terbesar ada di provinsi Jawa Timur yang mana dari total 34 provinsi di Indonesia, Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi yang sektor pengkoperasian dan Usaha Mikronya memiliki peran penting dalam menunjukkan perekonomian daerah. Hal ini terbukti kontribusi koperasi

dan UKM dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur cukup fantastis dari PDRB Jawa Timur sebesar Rp 884 Triliun. Sumbangan koperasi dan Usaha Mikro sangat besar mencapai lebih Rp 600 Triliun. Provinsi Jawa Timur sendiri mempunyai Peraturan Daerah No 4 tahun 2007 tentang pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur no 6 tahun 2011 tentang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, upaya menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah setidaknya dilandasi berdasarkan tiga alasan 1) Usaha Mikro bertujuan untuk menyerap tenaga kerja, 2) pemerataan pendapatan dan 3) pengentasan kemiskinan.

Berikut ini adalah data perkembangan jumlah Usaha Kecil di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang pesat. Terbukti data yang disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Usaha Mikro di Kota Surabaya

Tahun	Usaha Kecil (orang)	Usaha Mikro dan Kecil
2014	27.926	25.353
2015	28.391	25.147
2016	28.759	26.037
2017	29.507	26.800

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2017

Dinas perdagangan Kota Surabaya memiliki tugas untuk bisa membantu para pemilik Usaha Mikro dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro, karena jumlah Usaha Mikro yang terdaftar di Kota Surabaya dapat dimaksimalkan potensi dari Usaha Mikro. Permasalahan yang harus diselesaikan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya terkait antara lain : 1) kurang permodalan, 2) kesulitan dalam pemasaran, 3) persaingan usaha yang ketat, 4) kesulitan bahan baku, 5) kurang teknis produksi keahlian, 6) kurang ketrampilan manajerial, 7) kurang manajemen keuangan, 8) iklim usaha (perizinan, aturan perundang-undangan) yang kurang kondusif. Dari permasalahan yang ditemukan pada Usaha Mikro maka kegiatan pembinaan Usaha Mikro dilakukan berlandaskan UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk mengatur otonomi daerah, dengan adanya otonomi maka pemerintahan daerah mempunyai tugas untuk bisa meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri, dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya memasukkan pembinaan Usaha Mikro kedalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

Program pemberdayaan Usaha Mikro binaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dapat menyerap banyak Usaha Mikro yang ada di Kota Surabaya yaitu sebanyak 398 Usaha Mikro yang tersebar di seluruh Kota Surabaya, berikut data Usaha Mikro berdasarkan wilayah Usaha Mikro berada yang dibagi tiap kecamatan :

Tabel 2 Daftar Usaha Mikro Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya

Surabaya Bagian	Kecamatan	Jumlah Usaha Mikro Binaan
Surabaya Pusat	Tegalsari	18 Usaha Mikro
	Genteng	10 Usaha Mikro

	Bubutan	9 Usaha Mikro
	Simokerto	6 Usaha Mikro
Surabaya Utara	Pabean Cantikan	4 Usaha Mikro
	Semampir	8 Usaha Mikro
	Krembangan	11 Usaha Mikro
	Kenjeran	6 Usaha Mikro
	Bulak	8 Usaha Mikro
Surabaya Timur	Tambaksari	29 Usaha Mikro
	Gubeng	19 Usaha Mikro
	Rungkut	51 Usaha Mikro
	Tenggilis Mejoyo	18 Usaha Mikro
	Gunung anyar	10 Usaha Mikro
	Sukolilo	37 Usaha Mikro
	Mulyorejo	3 Usaha Mikro
Surabaya Selatan	Sawahan	33 Usaha Mikro
	Wonokromo	16 Usaha Mikro
	Karang Pilang	20 Usaha Mikro
	Dukuh Pakis	5 Usaha Mikro
	Wiyung	5 Usaha Mikro
	Wonocolo	10 Usaha Mikro
	Gayungan	3 Usaha Mikro
	Jambangan	10 Usaha Mikro
Surabaya Barat	Tandes	17 Usaha Mikro
	Sukomanunggal	7 Usaha Mikro
	Asemrowo	1 Usaha Mikro
	Benowo	6 Usaha Mikro
	Pakal	5 Usaha Mikro
	Lakasantri	2 Usaha Mikro
	Sambikerep	11 Usaha Mikro
	Jumlah	398 Usaha Mikro

Sumber : Diolah Peneliti, 2019

Dari data Usaha Mikro yang telah terdaftar di Dinas Perdagangan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan yang tercantum pada RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021 anatara lain : 1) Standarisasi produk, 2) memantapkan daya Saing usaha, dan 3) Perluasan Pemasaran. Dengan adanya program yang telah disiapkan dengan melakukan kegiatan diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi dari Usaha Mikro.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*, dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan (Djihani, 2003 dalam M. Anwar, 2013).

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Sulistiyani (2004:7) menjelaskan bahwa “Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” yang berarti memiliki atau mempunyai daya”. Menurut Rapport (1987), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh control individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Sementara itu, menurut Mc.Adle (1989) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh

orang-orang secara konsekuensi melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Semua konsep pemberdayaan pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mandiri. Namun kesejahteraan tersebut agar dapat dicapai maka dilakukan kegiatan yang dapat membangun masyarakat dan sesuai dengan martabat kemanusiaan dalam rangka Pembangunan nasional. Karena pada dasarnya setiap manusia atau masyarakat berkeinginan untuk membangun kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya. Dengan berlandaskan pada kemampuan dan potensi yang dimilikinya, sehingga masyarakat yang dikatakan lemah dan tidak berdaya akan menjadi berdaya.

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Berbagai program dan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro telah dijalankan.

Pemberdayaan merupakan bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan pada semua aspek yang terkait dengan manusia yang ada di lingkungannya, mulai dari segi intelektual (sumber daya manusia, material dan fisik, sampai pada aspek manajerial dalam mengelola suatu usaha). Aspek tersebut dapat dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, politik, keamanan, dan lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, menurut Chambers (Kartasasmita 1997: 6) konsep pemberdayaan mencerminkan suatu paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*".

Semua konsep pemberdayaan pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mandiri. Namun kesejahteraan tersebut agar dapat dicapai maka dilakukan kegiatan yang dapat membangun masyarakat dan sesuai dengan martabat kemanusiaan dalam rangka Pembangunan nasional. Karena pada dasarnya setiap manusia atau masyarakat berkeinginan untuk membangun kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya. Dengan berlandaskan pada kemampuan dan potensi yang dimilikinya, sehingga masyarakat yang dikatakan lemah dan tidak berdaya akan menjadi berdaya.

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro sebagai instansi yang terkait langsung mencoba untuk memfokuskan pada upaya mengkoordinasikan kebijakan pembangunan yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi dan Usaha Mikro dengan daya saing yang tinggi. Program kerja yang telah disusun bertujuan memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi koperasi dan Usaha Mikro dengan pelaku usaha lainnya, meningkatkan mobilitas sumber daya Usaha Mikro, mengurangi biaya transaksi bagi Usaha Mikro, menghilangkan biaya ekonomi tinggi bagi Usaha Mikro, serta mencabut berbagai peraturan dan kebijakan yang menghambat pemberdayaan Usaha Mikro di Indonesia.

Dalam hal ini, unsur-unsur pemberdayaan dapat dijadikan indikator terbentuknya sebuah standar umum untuk menciptakan pemberdayaan yang efektif dan efisien. Di sisi lain, faktor subyek masyarakat sebagai pelaku yang berdaya mempunyai indikator khusus. Indikator khusus merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan perubahan keadaan atau kemajuan atau memantau hasil dari suatu kegiatan, proyek atau

program dalam rentang waktu tertentu. Menurut Priyono dan Pranaka (1996: 65) pemberdayaan sendiri dapat diukur dengan: Pengetahuan masyarakat; Kemajuan masyarakat; dan Aktualisasi diri.

Dari konsep pemberdayaan diatas maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan pemberdayaan bergantung pada masalah kemandirian, peningkatan kreatifitas, dan kemampuan berkomunikasi dalam menyampaikan permaalahan yang dihadapi oleh pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang akan mengatur jalannya kegiatan pemberdayaan.

Usaha Mikro, merupakan sektor riil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam aktivitas bisnis sehari-hari.Usaha Mikro merupakan salah satu ujung tombak yang penting bagi Indonesia untuk dapat menguasai pasar bebas di tahun mendatang. Usaha Mikro juga telah menyelamatkan kondisi perekonomian Indonesia karena mampu menyerap banyak tenaga kerja yang saat itu pengangguran atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Setiap negara memiliki definisi dan konsep Usaha Mikro yang berbeda-beda tetapi secara umum sebuah Usaha Mikro mengerjakan lima (5) atau kurang pekerja tetap sedangkan usaha kecil menengah bisa berkisar antara kurang dari 100 pekerja, misalnya di Indonesia. Selain menggunakan klasifikasi jumlah pekerja, banyak negara yang juga menggunakan nilai aset tetap (tidak termasuk gedung dan tanah) dan omset dalam mendefinisikan Usaha Mikro (Tambunan, 2009).

Kegiatan Pembinaan Usaha Mikro yang dilakukan dikarenakan keberadaan Usaha Mikro dapat berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian. Untuk mengatasi pengangguran di kota besar, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berusaha untuk dapat mempercepat pertumbuhan Usaha Mikro. Dalam setahun, ratusan Usaha Mikro yang awalnya tidak memiliki legalitas dan merek sudah bisa mendapatkan legalitas dari produk.

Dikarenakan kegiatan pendaftaran legalitas dan merek merupakan sebagai salah satu kegiatan yang masuk dalam program pembinaan Usaha Mikro. Dilakukannya pendaftaran legalitas dan merek dapat menaikkan level Usaha Mikro agar dapat bisa naik. Mereka juga agar dapat juga bersaing dengan jenis usaha yang lain. Tahap pelatihan terakhir yang dilakukan oleh Disperindag adalah melakukan perluasan pemasaran produk Usaha Mikro, diharapkan untuk bisa menolong Usaha Mikro dalam memasarkan hasil produksi dari Usaha Mikro dan mampu menolong hasil penjualan agar meningkat.

Menurut Abraham Maslow, Ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan dasar kehidupan manusia melalui pengembangan segala sumber ekonomi yang ada dengan berdasarkan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Tindakan ekonomi adalah istilah yang mengacu kepada setiap usaha manusia berdasarkan dari pilihan yang sangat baik dan sangat menguntungkan. Macam-macam tindakan ekonomi adalah terdiri dari dua aspek antara lain sebagai berikut: a). Tindakan ekonomi rasional, setia usaha manusia berdasarkan dari pilihan paling menguntungkan, dan kenyataan memang demikian. b). Tindakan ekonomi irrasional, ialah setiap usaha manusia berdasarkan dari pilihan yang menguntungkan namun kenyataan tidak demikian.

Adanya pemberdayaan yang dilakukan berdampak positif pada kehidupan maupun perekonomian masyarakat. Ukuran peningkatan ekonomi para pelaku Usaha Mikro menurut Sumitro (1994: 60) antara lain : a). Menyerap tenaga kerja; b). Meningkatkan pendapatan masyarakat

Metode

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti menggambarkan dan menjelaskan situasi dan kondisi yang terjadi, setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, penelitian kualitatif akan menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Penulis mengambil lokasi penelitian di Usaha Mikro Selendang Semanggi Sambi Kerep, yang menjadi Usaha Mikro yang dinilai cukup berhasil dalam melakukan kegiatan pemberdayaan. Teknik pengambilan data yang digunakan pada penelitian adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 4 alur yaitu pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian alat yang digunakan untuk mengumpulkan data selama dalam penelitian di lapangan dengan menggunakan interview guide, buku catatan, handphone untuk merekan, wawancara dan melakukan pengamatan.

Hasil dan Pembahasan

Memaparkan dan menguraikan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021:

Program standarisasi Produk

Program standarisasi produk merupakan bentuk pemberdayaan dengan membantu Usaha Mikro untuk mengurus penguatan kelembagaan berupa pengurusan hak cipta, pendaftaran merk, halal dan BPOM. Hal tersebut sangat dibutuhkan oleh para pemilik usaha untuk bisa menyakinkan bahwa produk yang telak diproduksi oleh Usaha Mikro sudah memenuhi standar dan memang layak untuk diperjual belikan dipasaran. Syarat yang diminta oleh Disperindag dalam mengurus izin usaha juga terbilang disulit untuk dipenuhi oleh para pemilik Usaha Mikro untuk bisa mengajukan standarisasi kepada Disperindag yaitu dengan menyerahkan KTP warga asli Surabaya sudah bisa mengikuti program penguatan kelembagaan dan bisa didapatkan secara gratis.

Memantapkan Daya Saing Usaha

Proses pemberdayaan berikutnya yang bisa didapatkan oleh Usaha Mikro binaan dari Disperindag merupakan perbaikan dalam hal pengemasan produk yang dimiliki oleh Usaha Mikro. Dengan melakukan edukasi terhadap pemilik Usaha Mikro agar para pemilik para pemilik sadar bahwa dengan melakukan pengemasan produk yang dilakukan dengan baik dapat membantu untuk bisa menarik perhatian dan menambahkan nilai dari produk Usaha Mikro tersebut dapat menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan keadaan kemasan yang dilakukan dengan cara seadanya.

Pengemasan produk juga dapat dilakukan agar menjadi simbol dari identitas dari Usaha Mikro tersebut dengan memasukkan kreatifitas agar produk yang telah dibuat dapat mudah dikenali oleh pembeli dan mudah diingat. Karena adanya penguatan personal branding yang dilakukan dalam hal pengemasan produk memudahkan Usaha Mikro untuk bisa bersaing dengan produk serupa yang ada di pasaran. Kegiatan pengemasan produk juga didampingi oleh ahli dalam bidang pengemasan produk maka para pemilik Usaha Mikro tidak perlu ragu akan hasil nanti yang telah didapatkan setelah pelatihan selesai.

Kegiatan Perluasan Pemasaran

Kegiatan selanjutnya merupakan titik penting untuk bisa melihat bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperindang dapat berjalan dengan baik, maka dari itu Disperindag membantu Usaha Mikro untuk melakukan perluasan pemasaran dilakukan dengan cara penyediaan sentra-sentra Usaha Mikro yang disediakan secara gratis di tempat strategis seperti bandara, stasiun, dan hotel.

Penyediaan sarana yang telah disediakan oleh Disperindag tidak dipungut biaya oleh Disperindag karena memang disediakan untuk para Usaha Mikro binaan untuk bisa meningkatkan penjualan, selain dilakukan penjualan secara offline Disperindag juga menyediakan website agar Usaha Mikro bisa memasarkan secara online melalui website portal Usaha Mikro Kota Surabaya. Hal tersebut dilakukan karena pembeli yang pernah berkunjung ke Surabaya dan pernah membeli produk Usaha Mikro bisa membeli tanpa harus datang lagi ke Surabaya.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis di lapangan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro binaan Usaha Mikro Disperindag sudah cukup baik untuk bisa meningkatkan ekonomi dari pelaku Usaha Mikro berdasarkan dari RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Program pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan adalah standarisasi produk yang meliputi pengurusan SIUP, PIRT, sertifikasi halal, BPOM, dan pendaftaran merk. Program memantapkan daya saing usaha dilakukan pendampingan dengan cara melakukan pembaharuan pengemasan yang didampingi oleh tim tata rupa yang telah disediakan oleh dinas. Program terakhir adalah perluasan pemasaran yang dilakukan dinas dengan cara menyediakan sentra-sentra Usaha Mikro secara gratis, membuatkan website, dan pemberian kontrak kerja oleh Pemkot Surabaya, untuk kontrak kerja diberikan kepada Usaha Mikro yang memenangkan lomba yang diselenggarakan oleh Pemkot dengan bentuk sebagai penyedia makanan di saat pemkot mengadakan acara. Setelah terlaksananya program pemberdayaan yang dilakukan maka akan mampu membantu Usaha Mikro dalam memperluas pemasaran produknya dan mampu menyerap tenaga kerja yang berada di sekitar Usaha Mikro, yang merupakan tujuan dari dilakukannya pemberdayaan Usaha Mikro.

Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program pemberdayaan Usaha Mikro adalah adanya kuota yang diberlakukan dalam mengurus standarisasi produk. Dengan adanya kuota sebanyak 100 izin tiap bulannya dapat menghambat untuk Usaha Mikro dalam mengurus izinnya.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 1998. Produser Penelitian Suatu Pendekatan praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Bogdan dan Taylor. 2012. Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif. (him. 4). Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Chambers, R. 1996. Participatory Rural Appraisal : Memahami Desa Secara Partisipatif. Oxam – Kanisius. Yogyakarta.

- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. PT Pusaka LP3ES Indonesia. Jakarta
- Dr. Zubaedi, M.Ag, M.pd, 2013, Pengembangan Masyarakat (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup) Eddy. CH. Papilaya 2002, dalam Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternatif. (Jogjakarta : Ar Ruzz media)
- Hikmat, Harry. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Bandung : Humaniora Utama Press.
- Jeremy Mc, Ardhle, 1989. Community Development ; Tools Of The Trade, Community Quaertelyt, No 16, Waragul
- Kartamasita, Koesnadi. 1997. Administrasi Internasional. Bandung : Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Admininstrasi
- Koentjaraningrat. 1997. Metode Penelitian Masyarakat. Gramedia : Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. Ekonomi pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi. 1992, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia
- Moh. Nazir. 1988. Metode Penelitian (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- Moleong Lexy, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : CV. Remaja
- Nugroho, Eko. 2008. Partisipasi Masyarakat Desa. Andi : Yogyakarta.
- Oakley, Peter, et al. 2001. Projets With People, the parctice of participation in Rural Development. Geneva. Internasional labour office
- Priyono, OS dan A.W.M. Pranaka. 1996. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan,dan Implementasi. Center For Strategic and Internasional Studies (CISC), Jakarta
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods). Bandung. Alfabeta
- Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung : Refika Aditama 2015
- <http://www.kadin-indonesia.or.id>
- <http://www.koperasiukm.com>
- <http://disperdagin.surabaya.go.id/katalog/site/view/51>
- <https://elocalmarket.surabaya.go.id/>